

Manajemen Program Bimbingan Konseling Sekolah Menengah Pertama

Ilya Aida Darliyan Fitri¹, Dede Rahmat Hidayat², Sofia Hartati³

¹Pascasarjana, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

ilyadarliyan_bk16s2@mahasiswa.unj.ac.id

²Pascasarjana, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

dederhidayat@unj.ac.id

³Pascasarjana, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

sofiahartati@unj.ac.id

Abstrak

Manajemen bimbingan konseling yang dibuat secara sistematis akan menciptakan layanan bimbingan konseling yang efektif dan efisien bagi peserta didik. Salah satunya dengan cara dibuatnya program bimbingan konseling yang jelas, terorganisir dan rasional. Namun dalam membuat program bimbingan konseling, terdapat beberapa kendala diantaranya adalah minimnya anggaran untuk kegiatan bimbingan konseling di sekolah, minimnya keterampilan yang dimiliki guru bimbingan konseling dalam merencanakan program bimbingan konseling. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran manajemen bimbingan konseling, kelebihan serta kekurangan program di tiap sekolah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan hasil temuan diatas hanya SMPN 259 melaksanakan manajemen program layanan bimbingan konseling lebih baik atau unggul dibanding yang lainnya. Masing-masing program memiliki kelemahan dan kelebihan dan mungkin jika disatukan akan menjadi program yang lebih baik.

Kata Kunci: Manajemen, Program, Bimbingan Konseling

Abstract

Management of guidance counseling is systematically created effective and efficient guidance counseling services for students. One of them is by making a clear, organized and rational guidance counseling program. However, in making guidance counseling programs, there are several obstacles including the lack of budget for counseling guidance activities in schools, the lack of skills possessed by school counselor in planning guidance counseling programs. This research was conducted to determine the description of management of guidance counseling, advantages and disadvantages of the program in each school. This research uses a descriptive method. Based on the above findings, only SMPN 259 implements better counseling program management services or guidance compared to the others. Each program has weaknesses and strengths and if united would be better program.

Keywords: Management, Program, Guidance Counseling

PENDAHULUAN

Sekolah menjadi salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan tuntutan zaman. Sekolah dapat memberikan layanan bimbingan konseling bagi peserta didik agar mereka dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan tahap perkembangan. Tujuan utama layanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah memberikan dukungan pada pencapaian kematangan kepribadian, keterampilan sosial, kemampuan akademik, dan bermuara pada terbentuknya kematangan karir individual yang diharapkan dapat bermanfaat di masa yang akan datang (Rahman, 2009).

Manajemen bimbingan konseling yang dibuat secara sistematis akan menciptakan layanan bimbingan konseling yang efektif dan efisien bagi peserta didik. Salah satunya dengan cara dibuatnya program bimbingan konseling yang jelas, terorganisir dan rasional. Selain itu, penyelenggaraan suatu program bimbingan dan konseling agar terlaksana dengan baik maka harus dilakukan dalam suatu alur manajerial yang utuh mulai dari *planning, designing, implementing, evaluating*, dan *improving* (Gysbers, Norman, C. and Henderson, 2012). Namun dalam membuat program bimbingan konseling memiliki beberapa kendala diantaranya adalah minimnya anggaran untuk

pendidikan pada kegiatan bimbingan konseling di sekolah, minimnya keterampilan yang dimiliki guru bimbingan konseling dalam merencanakan program bimbingan konseling. Penelitian lain menunjukkan bahwa guru bimbingan konseling di Kabupaten Gunungkidul masih dalam kategori sedang, artinya belum semua guru bimbingan konseling memiliki pemahaman baik mengenai program bimbingan konseling komprehensif (Bhakti, Kumara, & Safitri, 2017).

Sebelum merencanakan program bimbingan konseling baiknya melakukan asesmen kebutuhan kepada peserta didik. Program bimbingan konseling dapat berjalan dengan efektif bila didasarkan pada kebutuhan nyata dan sesuai dengan kondisi objektif perkembangan peserta didik (Kurniawan, 2015). Saat ini Indonesia dikenal dua macam program bimbingan konseling yaitu bimbingan konseling dengan pola 17 dan 17+ atau bimbingan konseling komprehensif.

Berdasarkan lampiran permendikbud tahun 2014 nomor 111 program bimbingan konseling cenderung mengacu pada model bimbingan konseling komprehensif karena adanya empat komponen program bimbingan konseling yaitu layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual dan dukungan system (Peraturan Menteri nomor 111, 2014). Model program bimbingan konseling komprehensif

dapat disebut juga dengan Model Missouri. Model program bimbingan konseling komprehensif merupakan skema atau bagan organisasi yang terdiri dari gambaran prosedur dan sistem (Cobia & Henderson, 2006). Model bimbingan konseling komprehensif dibagi kedalam empat bidang (*ASCA National model*, 2012). ASCA (Asosiasi Guru BK Amerika) memiliki penjelasan yang rinci mengenai keempat komponen program BK komprehensif tersebut. *Foundation* berisi pemikiran, filosofi, visi dan misi serta kompetensi bidang layanan. *Delivery System* didalamnya memuat kurikulum bimbingan, perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. *Management System* terdiri dari tata aturan, penggunaan data, rencana tindakan dan penjadwalan. *Accountability* didalamnya terkandung laporan hasil kinerja konselor dan evaluasi program. Program bimbingan konseling komprehensif juga melibatkan kolaborasi berbagai pihak yang dianggap memiliki keterkaitan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik (Gysbers, Norman, C. and Henderson, 2012). Bimbingan konseling komprehensif telah terbukti efektif dalam memberikan kontribusi pada pencapaian prestasi akademis peserta didik, perubahan sikap dalam pembelajaran lebih baik, komitmen sekolah, pemberdayaan guru bimbingan konseling, dan

mempengaruhi keterampilan sosial, kepercayaan diri dan kesehatan mental peserta didik (Escapa & Julià, 2018; Furqon dan Badrujaman, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen program bimbingan konseling di tiga Sekolah Menengah Pertama di Jakarta dan untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan guru BK dalam menyusun program bimbingan konseling.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan jenis survey. Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Zuriah, 2009). Pada penelitian ini tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan sebagaimana terdapat dalam penelitian eksperimen, dan tidak ada pula pengujian hipotesis (Basuki, 2006). Subjek penelitian dilakukan pada tiga sekolah menengah pertama di Jakarta yaitu SMP Negeri 259 Jakarta, SMP Negeri 277 Jakarta, dan SMP Negeri 283 Jakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, wawancara dan observasi. Angket yang digunakan adalah instrumen evaluasi manajemen program BK menggunakan SSE-Program Audit

dari model ASCA nasional yang telah dimodifikasi berdasarkan kebutuhan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

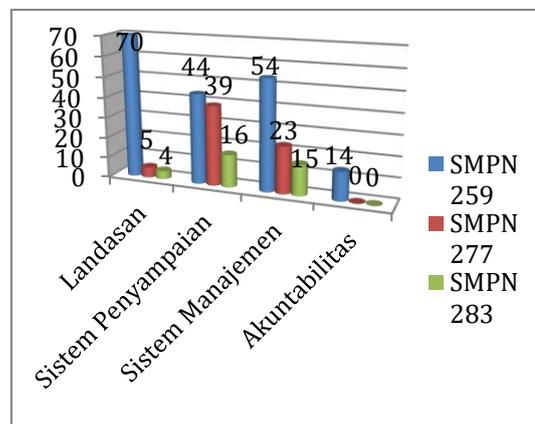
Tabel 1. Persentase Gambaran Manajemen BK

	Nama Sekolah	Skor	%
1.	SMP Negeri 259 Jakarta	178	52 %
2.	SMP Negeri 277 Jakarta	67	19 %
3.	SMP Negeri 283 Jakarta	35	10 %

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa dua sekolah yang masuk dalam kategori rendah dalam melaksanakan manajemen program bimbingan konseling yaitu SMP Negeri 283 dan SMP Negeri 277 yang masing – masing memiliki persentase sebesar 10% dan 19%

Gambaran persentase manajemen bimbingan konseling di tiga Sekolah Menengah Pertama Negeri di Jakarta dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

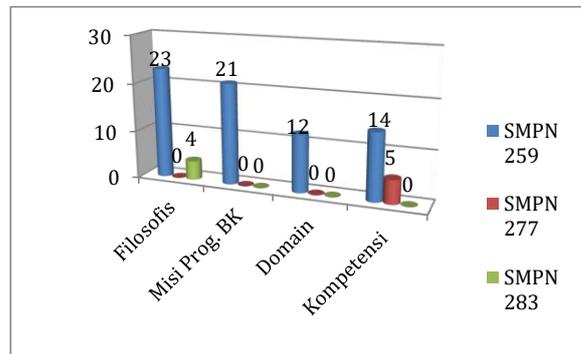
sedangkan SMP Negeri 259 dalam melaksanakan manajemen program bimbingan konseling memiliki persentase sebesar 52% yang masuk dalam kategori sedang. Gambaran manajemen bimbingan konseling ditinjau pada setiap aspek dapat dilihat melalui grafik dibawah ini:



Gambar 1. Grafik skor tiap aspek

Dari grafik diatas, SMPN 259 cenderung dominan pada setiap aspek ASCA National Model Program Audit dibandingkan kedua

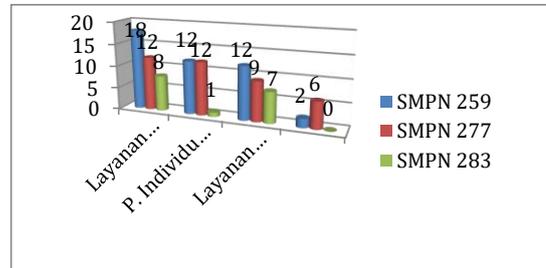
sekolah lainnya yaitu SMPN 277 dan SMPN 283. Selain itu, perbedaan juga dapat terlihat dengan jelas melalui grafik dibawah ini:



Gambar 2. Grafik Aspek Landasan

Dari grafik diatas SMPN 259 terlihat lebih tinggi pada setiap indikator dalam aspek landasan dibandingkan dua sekolah lainnya yaitu SMPN 277 dan SMPN 283. Bila dilihat pada aspek sistem

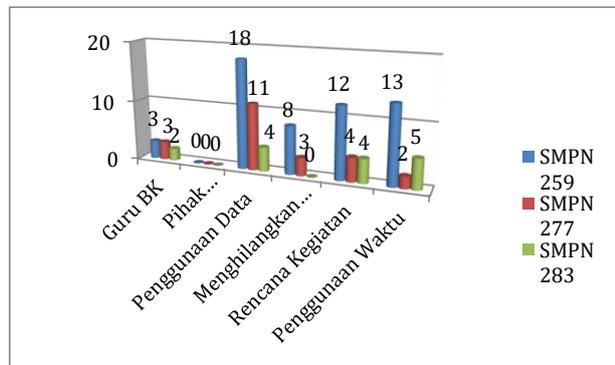
penyampaian, SMPN 259 juga lebih tinggi pada setiap indikator dalam aspek sistem penyimpanan. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 3. Grafik Aspek Sistem Penyampaian

Dari grafik diatas terlihat adanya perbedaan pada masing – masing indikator dalam aspek sistem penyampaian. Pada indikator layanan dasar dan layanan responsif SMPN 259 lebih unggul dibandingkan dua SMP lainnya dengan poin pada kedua indikator tersebut yaitu 18 dan 12 poin. Berbeda dengan indikator perencanaan individu siswa, terlihat

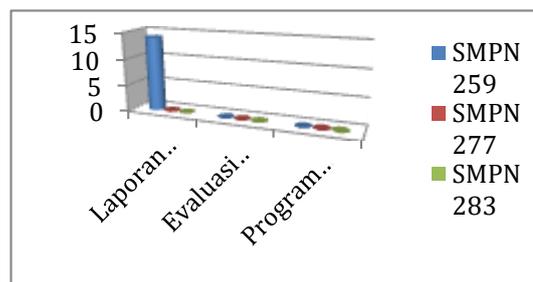
SMPN 259 sebanding dengan SMPN 277 yang masing – masing memiliki poin sebesar 12. Selanjutnya pada indikator dukungan sistem SMPN 277 lebih unggul dibandingkan dua SMP lainnya dengan poin sebesar 6. Pada aspek sistem manajemen akan terlihat variasi tinggi rendahnya pada setiap indikator. Grafik sistem manajemen dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 4. Grafik Aspek Sistem Manajemen

Dari grafik diatas terlihat adanya perbedaan pada masing – masing indikator dalam aspek sistem manajemen. Pada indikator guru BK SMPN 259 dan SMPN 277 memiliki poin yang sama yaitu sebesar 3. Poin 0 terdapat pada indikator pihak berkementingan. Dalam indikator penggunaan data poin 18 dimiliki oleh SMPN 259, poin 11 dimiliki pada SMPN 277 dan SMPN 283 dengan poin sebesar 4. SMPN 259

juga dominan pada tiga indikator lainnya dengan masing – masing poin sebesar 8, 12 dan 13. Lain halnya dengan aspek akuntabilitas, pada setiap indikator terlihat ketiga sekolah belum melaksanakan berbagai hal yang ada dalam indikator laporan hasil, evaluasi kinerja guru BK dan program evaluasi. Berikut ini tabel grafik aspek akuntabilitas yaitu:



Gambar 5. Grafik Aspek Akuntabilitas

Dari grafik diatas terlihat jelas perbedaan pada masing – masing indikator dalam aspek akuntabilitas. Pada indikator laporan hasil SMPN 259 memiliki poin 14 dibandingkan

sekolah lainnya yang masing – masing memiliki poin sebesar 0. Selanjutnya pada indikator evaluasi kinerja dan program hasil, seluruh sekolah memiliki poin 0. Hal ini

menjelaskan bahwa ketiga sekolah belum memiliki pemahaman dan keterampilan mengenai evaluasi kinerja dan program hasil sehingga akuntabilitas guru BK terhadap sekolah sangatlah rendah.

Pembahasan

Berdasarkan tabel 1 terlihat satu sekolah yang sudah cukup baik membuat program bimbingan konseling walaupun terdapat beberapa hal yang belum sesuai standar ASCA/POP BK yaitu SMP 259 Jakarta. Pada grafik 2 aspek landasan SMPN 259 lebih menonjol karena memiliki landasan atau dasar yang jelas di dalam program bimbingan konseling seperti keyakinan (*belief*) guru bimbingan konseling yang didasari oleh latar belakang dan pengalaman terhadap peserta didik, keluarga dan *stakeholder* sekolah kompetensi peserta didik yang sesuai dengan sepuluh standar kompetensi kemandirian peserta didik (SKKPD) SMP, urgensi bimbingan konseling di sekolah serta visi misi bimbingan konseling sekolah (*ASCA National model*, 2012).

Dalam menerapkan program bimbingan konseling komprehensif harus berdasarkan tujuan program. Tujuan program terdiri dari data sekolah dan misi visi bimbingan konseling yang diselaraskan dengan misi visi sekolah (Young, 2011). Ketiadaan tujuan pada program bimbingan konseling akan

mempengaruhi proses pelayanan yang diberikan guru bimbingan konseling kepada peserta didik. Sebab, tujuan program menjadi salah satu kriteria landasan atau dasar dari pembuatan program bimbingan konseling. Terhambatnya guru bimbingan konseling SMPN 283 dan SMPN 277 dalam membuat program bimbingan konseling dikarenakan jumlah rasio antara guru bimbingan konseling dengan peserta didik tidak sesuai dengan ketentuan serta kurangnya kompetensi dan keterampilan dalam membuat program bimbingan konseling. Penelitian lain menyebutkan bahwa banyak guru bimbingan konseling kurang informasi yang jelas mengenai tugas pokok, kewalahan dengan tanggung jawab yang diberikan sekolah selain pelayanan bimbingan konseling dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan profesi yang tidak sesuai (Moyer, 2011; Wilkerson & Bellini, 2006).

Pada grafik 3 aspek sistem penyampaian yang terdiri dari layanan dasar, perencanaan individu, dukungan sistem dan layanan responsif. Guru bimbingan konseling dari masing-masing sekolah sudah memberikan empat layanan pada bidang bimbingan konseling (pribadi, sosial, karir, dan belajar) yang diadaptasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru bimbingan konseling SMPN 283 kurang mendapatkan dukungan dari guru

mata pelajaran lain sehingga menghambat pelayanan bimbingan konseling. Hambatan dalam penerapan program bimbingan konseling diantaranya rasio guru bimbingan konseling dan peserta didik yang tidak ideal, ambiguitas peran guru bimbingan konseling di sekolah, kendala anggaran dan tugas non-konseling lainnya (Cobb, 2011). Peran ganda guru bimbingan konseling SMPN 277 juga diakui menghambat pemberian layanan bimbingan konseling. Seharusnya guru bimbingan konseling memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi akan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan, dan keterbatasan mereka sendiri, dan tahu untuk tidak bertindak di luar batas kualifikasi profesional mereka (South Carolina Guidance and Counseling Writing Team, 2008).

Guru bimbingan konseling dari tiga sekolah belum maksimal dalam melakukan perencanaan individu peserta didik. Idealnya guru bimbingan konseling memantau empat bidang layanan yaitu karir, belajar, pribadi dan sosial peserta didik secara berkala dengan cara memberikan penilaian berdasarkan pengumpulan data, memberikan saran/nasihat, dan menindak lanjuti terkait rencana peserta didik (Gysbers, Norman, C. and Henderson, 2001). Perencanaan individu berfokus pada membantu siswa, dalam kerja sama erat dengan orang tua, untuk mengembangkan,

menganalisis, mengevaluasi, dan melaksanakan tujuan dan rencana pendidikan, pekerjaan, dan pribadi mereka. Pemberian layanan responsif disetiap sekolah biasanya ditangani saat peserta didik mengalami masalah pada guru mata pelajaran. Tindakan yang dilakukan lebih sering dengan cara konseling individu dan berkolaborasi dengan orangtua, walikelas dan guru mata pelajaran. Dukungan sistem masih kurang dirasakan oleh guru bimbingan konseling di tiga sekolah ini. Padahal dukungan sistem sangatlah penting dalam berjalannya program bimbingan konseling komprehensif. Layanan dasar, perencanaan individu dan layanan responsif tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan sistem (Gysbers, Norman, C. and Henderson, 2001). Peran guru bimbingan konseling perlu didukung oleh *stakeholder* sekolah dan orangtua peserta didik. Padahal peran guru sangat penting dalam memotivasi prestasi dan kompetensi sosial peserta didik (Wentzel, 1999).

Aspek sistem manajemen pada grafik 4 yang dilaksanakan pada masing-masing sekolah berbeda-beda. Perbedaan terlihat jelas pada pengelolaan data, monitoring peserta didik serta rencana kegiatan. Dalam memonitoring peserta didik, SMPN 259 melakukan pengumpulan data pribadi terutama peserta didik yang berprestasi. Guru bimbingan konseling mengumpulkan prestasi apa saja yang sudah diraih peserta

didik di tingkat kecamatan, madya dan daerah sebagai bukti peserta didik memiliki kemajuan pada bidang yang digelutinya. Pemantauan dilihat melalui konsistensi peserta didik dalam menggeluti bidang yang disukai melalui hasil rapot untuk prestasi akademik atau berdasarkan observasi dan wawancara guru bimbingan konseling dengan pelatih (bila peserta didik memiliki prestasi di bidang olahraga atau lainnya). SMPN 277 melakukan pengumpulan data pribadi dan data prestasi berupa *fotocopy* sertifikat peserta didik sedangkan SMPN 283 mengumpulkan data pribadi dan poin pelanggaran yang dilakukan peserta didik. Penggunaan data dapat meningkatkan kepercayaan dan kinerja guru bimbingan konseling di sekolah dan memudahkan dalam memonitoring kemajuan akademik formatif dan sumatif peserta didik (Young, 2011).

Tiga sekolah lebih banyak menjawab tidak ada pada aspek akuntabilitas (grafik 5). Akuntabilitas sering disebut sebagai katalis dalam meningkatkan kredibilitas guru bimbingan konseling dan sarana untuk menetapkan hasil yang diinginkan pada program konseling sekolah (Young, 2011). Akuntabilitas dilakukan sebagai jembatan penghubung antara guru bimbingan konseling sebagai pelaksana dengan *stakeholder* maka diperlukan

pelaporan pelaksanaan program bimbingan konseling, evaluasi kinerja dan evaluasi program bimbingan konseling.

Guru bimbingan konseling mengakui bila mereka tidak berkompeten dalam mengevaluasi program karena pengetahuan dan keterampilan dalam membuat evaluasi program yang kurang sehingga pengembangan program bimbingan konseling tidak tersusun dengan rapi dan terencana. Padahal pentingnya pengetahuan evaluasi dapat berdampak pada rendahnya akuntabilitas baik dimata kepala sekolah, guru pelajaran maupun peserta didik. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa melakukan akuntabilitas dapat meningkatkan kinerja peserta didik dan dapat mengukur serta memantau efektifitas program yang telah dilaksanakan (ASCA *National model*, 2012; Hatch, Poynton, & Pérusse, 2015; Young, 2011).

Selama ini guru bimbingan konseling melakukan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan, pelaporan hasil program bimbingan konseling pun hanya sebatas lisan kepada pimpinan sekolah sehingga program bimbingan konseling yang dibuat hanya dirasakan oleh kalangan tertentu saja. Evaluasi bertujuan untuk membantu konselor sekolah dalam mencapai dan meningkatkan potensi profesional mereka. Hal ini dapat membantu guru bimbingan konseling mendefinisikan

pekerjaannya, memberikan pengawasan profesional, melakukan evaluasi kinerja, dan menetapkan tujuan untuk pengembangan profesional yang berkelanjutan. Selain itu, tujuan evaluasi juga untuk meningkatkan penyampaian dan dampak program pada peserta didik juga orang tua yang diberikan pelayanan serta untuk media komunikasi antara guru bimbingan konseling, pimpinan sekolah dan administrator sekolah (Gysbers, 2001). Ketika satu tahun ajaran sudah terlewati mestinya guru bimbingan konseling tidak memulai ajaran baru dengan penggunaan program bimbingan konseling sebelumnya yang tanpa perubahan. Idealnya guru BK dapat menggunakan program tahun sebelumnya namun dengan perbaikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan.

Saat ini guna membantu guru BK dalam melaksanakan manajemen maka alur manajerial sudah distandarkan secara nasional dengan disusunnya panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Manajemen program bimbingan dan konseling di sekolah yang menjadi objek penelitian belum berjalan maksimal, yang terlihat jelas ialah karena terdapat alur manajerial yang terpotong dan tidak terlaksana sehingga program bimbingan konseling tidak utuh. Alur manajerial yang utuh terdiri dari *planning, designing,*

implementing, evaluating, dan enhancing (Gysbers, Norman, C. and Henderson, 2012). Lima tahapan tersebut harus dilakukan secara sistematis agar program bimbingan dan konseling menjadi sebuah kegiatan yang berkelanjutan tidak terputus guna mencapai tujuan. Penyelenggaraan suatu program bimbingan konseling semestinya didukung oleh sistem manajemen yang baik (Furqon dan Badrujaman, 2014). Jika dibandingkan, SMPN 259 melaksanakan manajemen program layanan bimbingan konseling lebih baik atau unggul dibanding yang lainnya. Masing-masing program memiliki kelemahan dan kelebihan dan mungkin jika disatukan akan menjadi program yang lebih baik.

SIMPULAN

Penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah harus dikelola secara profesional guna pencapaian tujuan yang optimal. Salah satu ciri dari pengelolaan secara profesional ialah bahwa pelaksanaan bimbingan dan konseling dibuat secara terprogram. Program bimbingan konseling yang diselenggarakan pada tiga sekolah terhenti pada alur evaluasi sehingga tidak dapat diketahui kekurangan serta kelebihan dari program yang telah dibuat. Kurangnya kompetensi guru bimbingan konseling dalam melakukan evaluasi program bimbingan konseling menjadi salah satu alasannya. Idealnya sebuah

program disusun mengikuti alur manajerial yang utuh, dimulai dari perencanaan (*planning*), perancangan (*designing*), pelaksanaan (*implementing*), evaluasi (*evaluating*), dan perbaikan (*enhancing*). Oleh karena itu, perlu diadakan seminar atau pelatihan manajemen bimbingan konseling guna meningkatkan kompetensi guru bimbingan konseling terutama dalam pelaksanaan evaluasi hingga perbaikan program bimbingan konseling.

DAFTAR PUSTAKA

- ASCA *National model*. (2012). Retrieved from <http://www.ascanationalmodel.org/content.asp?contentid=18>
- Basuki, S. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta.
- Bhakti, C. P., Kumara, A. R., & Safitri, N. E. (2017). Pemahaman guru bimbingan dan konseling tingkat SMP tentang bimbingan dan konseling komprehensif. *Counselia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 7(1), 11. <https://doi.org/10.25273/counselia.v7i1.1163>
- Cobb, N. A. (2011). *Progressing towards the implementation of the Tennessee model for comprehensive school counseling programs: a study of school counselor priorities and practices*.
- Cobia, D. C., & Henderson, D. A. (2006). *Developing an effective and accountable school counseling program*. Prentice Hall.
- Escapa, S., & Julià, A. (2018). *What impact do guidance and counselling programs have on students?*
- Furqon dan Badrujaman, A. (2014). *Model Evaluasi Layanan Dasar Berorientasi Akuntabilitas*. Jakarta: Indeks.
- Gysbers, Norman, C. and Henderson, P. (2001). *Comprehensive Guidance and Counseling Programs: A Rich History and a Bright Future*. *Professional School Counseling*, 4(4), 289. Retrieved from <https://www.questia.com/library/journal/1P3-70579253/results-based-comprehensive-guidance-and-counseling>
- Gysbers, Norman, C. and Henderson, P. (2012). *Developing and Managing Your School Guidance and Counseling Program* (fifth edit).
- Gysbers, N. C. (2001). *Assessing the Effectiveness of School Guidance Programs : Program , Personnel , and Results Evaluation By Norman C . Gysbers*.
- Hatch, T., Poynton, T. A., & Pérusse, R. (2015). *Comparison Findings of School Counselor Beliefs About ASCA National Model School Counseling Program Components Using the SCPCS*.
- Kurniawan, L. (2015). Pengembangan Program Layanan Bimbingan Dan Konseling Komprehensif Di Sma. *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Konseling: Jurnal Kajian Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, 1(1), 1.

- <https://doi.org/10.26858/jpkk.v1i1.1351>
- Moyer, M. (2011). Effects of Non-Guidance Activities, Supervision, and Student-to-Counselor Ratios on School Counselor Burnout. *Journal of School Counseling*, 9, 1–31. <https://doi.org/Retrieved> November 17, 2014
- Peraturan Menteri nomor 111, K. R. I. 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. , Jakarta: Depdikbud § (2014).
- Rahman, F. (2009). *Bimbingan dan Konseling Komprehensif; Dari Paradigma Menuju Aksi*. Disampaikan pada Workshop Penyusunan Program BK Komprehensif.
- South Carolina Guidance and Counseling Writing Team. (2008). *The South Carolina Comprehensive Developmental Guidance and Counseling Program Model Guidance and Counseling*.
- Wentzel, K. R. (1999). *Social-Motivational Processes and Interpersonal Relationships : Implications for Understanding Motivation at School*. 91(1), 76–97.
- Wilkerson, K., & Bellini, J. (2006). Intrapersonal and organizational factors associated with burnout among school counselors. *Journal of Counseling and Development*, 84(4), 440–450. <https://doi.org/10.1002/j.1556-6678.2006.tb00428.x>
- Young, A. (2011). *The Beliefs and Practices of*. (December), 67–76.
- <https://doi.org/10.1177/2156759X1101500204>
- Zuriah, N. (2009). *Metode Pendidikan Sosial Dan Penelitian Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.